

**PARTISIPASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DALAM PROGRAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2013
(Studi Desa Parangargo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)**

CHRIS WIJAYANTI PUSPITA

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine: (1) the level of public participation and the institution of Society in infrastructure development programs in the district of Wagir Malang in 2013, (2) factors affecting participation and Social Institutions in Rural infrastructure development programs in the district Wagir Malang in 2013, (3) efforts which have been made to increase the participation of local governments and communities in the framework of the Institute of Community Rural infrastructure development in Wagir Malang. The approach used in this research is descriptive qualitative type of research in the form of case study. Data was obtained from eight informants are the chief and seven villagers of Parangargo by observation and interview data collection.

Based on the results of the data analysis, three conclusions were obtained: (1) Generally, public participation of Parangargo village is quite good viewed from the number of participants and the amount of participation. Meanwhile, the participation of the Village Community Institution of Parangargo still requires learning in empowering village communities because LKD Parangargo is relatively new; (2) there are three factors that influence the community participation and social institutions in Parangargo village society condition, LKD conditions, and the ability of the government to increase public participation. There are three village government efforts to increase community participation in Parangargo Village which is a discussion forum of the village, re-activation of PKK, and re-enable the youth clubs.

Keywords: *Participation, Community, Community Organization, Infrastructure Development*

LATAR BELAKANG

Sendi ketiga penyangga otonomi daerah adalah pemberdayaan (*empowering*). Pemberdayaan (*empowering*) dalam pelaksanaan otonomi yang luas harus dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan demokratisasi dalam kehidupan masyarakat daerah. Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui pembangunan yang partisipatif. Rasyid (2010:10) menyatakan visi dan konsep dasar otonomi daerah adalah:

“Di bidang ekonomi, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perijinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan demikian otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejah-

Alamat Korespondensia:

Chris Wijayanti Puspita, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Malang

Email: chrishwuspita@gmail.com

teraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

Prasarana yang baik mampu menunjang kegiatan ekonomi yang lebih baik sehingga kondisi sosial ekonomi masyarakat juga ikut membaik. Dalam kenyataannya kemampuan pemerintah dalam menyediakan prasarana sangatlah terbatas dan partisipasi masyarakat tidak dapat muncul dengan sendirinya, perlu komunikasi pembangunan untuk terus menerus mendorong partisipasi masyarakat agar tetap berada dalam permukaan. Pada sisi yang lain, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang baik, menunjang masyarakatnya memiliki kemampuan berpartisipasi dalam penyediaan prasarana di lingkungannya. Hal ini semacam rantai partisipasi yang akan terus berkaitan dengan rantai kesejahteraan jika baik pemerintah maupun lembaga terkait dan masyarakat saling mendukung.

Pemerintah tidak mungkin membiayai semua bentuk pembangunan yang diharapkan masyarakat. Jumlah penduduk yang semakin lama semakin meningkat menuntut pemerintah juga harus menyediakan prasarana yang semakin baik. Di lain sisi, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar yang dimiliki pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan. Melihat kondisi tersebut, peran pemerintah dalam menyediakan prasarana semakin lama harus semakin dikurangi dan peran tersebut harus digantikan oleh organisasi non-pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Substitusi peran ini merangsang dan mengarahkan pada penekanan dalam hal kemandirian (*selfhelp*), maksudnya ialah masyarakat itu yang mengelola dan

mengorganisasikan sumber-sumber lokal baik yang bersifat dana, materiil, pikiran, maupun tenaga.

Menurut Sumodiningrat (1999: 223) model pembangunan yang partisipatif mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal. Model ini menekankan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan model tersebut, maka program pemerintah yang tergolong kedalam model pembangunan partisipatif adalah program yang dikelola sendiri oleh masyarakat bukan oleh aparat pemerintah. Dengan demikian, keberhasilan proyek atau program pemerintah sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam mengerahkan segala kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk mendukung pelaksanaan program partisipatif dari pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dengan menggunakan kemampuan dan potensi yang dimilikinya akan membuahkan hasil *keberdayaan* masyarakat yang akan semakin membaik.

Sedangkan untuk lembaga non pemerintah yang terlibat dalam proses pembangunan partisipatif juga akan mengalami penguatan. Sumodiningrat (1999:220) mengatakan penguatan yang dimaksud tidak hanya meliputi fisik saja seperti bangunan dan kelengkapan organisasi tetapi juga meliputi penguatan fungsi dan peran mereka sebagai organisasi yang menerima wewenang untuk melaksanakan, memantau dan menjaga pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

Dengan menguatnya fungsi dan peran lembaga non-pemerintah

ini dan apabila program pembangunan diserahkan kepada organisasi yang dipercaya masyarakat tersebut, maka partisipasi masyarakat untuk mensukseskan program tersebut dapat dijamin tergolong tinggi. Untuk menjaga keterjaminan kesuksesan program partisipatif ini, maka pemerintah harus mampu memilah sektor-sektor yang perlu diserahkan pembangunan dan pengelolaannya kepada masyarakat serta bantuan perangsang yang harus diberikan oleh pemerintah. Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai rekan kerja pemerintah diharapkan mampu membantu pemerintah desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk mengakomodasi aspirasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan.

Pratikno (2005:26) mengatakan bahwa pemerintahan di daerah yang dijalankan secara demokratis akan memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk ikut menuangkan kedaulatannya. Semangat otonomi daerah ditunjukkan dalam undang-undang no. 22 tahun 1999 BAB I poin h yang sekarang menjadi undang-undang no. 32 tahun 2004 berbunyi, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari dua pernyataan tersebut jelas bahwa masyarakat berhak mengeluarkan aspirasinya.

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yaitu sarana dan prasarana, seringkali masyarakat enggan untuk berpartisipasi karena

menganggap hanya akan menguntungkan kelompok tertentu saja. Sasaran dari program pembangunan partisipatif ini adalah semua masyarakat, namun hanya beberapa masyarakat yang ikut berpartisipasi dan yang lainnya memilih sikap yang apatis. Sehingga hasil yang ada adalah sarana dan prasarana yang sudah dibangun tidak memenuhi keinginan masyarakat dan manfaatnya kurang begitu dirasakan oleh masyarakat secara luas. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan fisik pada perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana nampaknya masih jauh dari yang diharapkan pemerintah.

Kecamatan Wagir bukanlah salah satu dari kecamatan yang tertinggal di Kabupaten Malang, sebaliknya Kecamatan Wagir merupakan salah satu kecamatan yang sudah berkembang, yang seharusnya ditunjukkan pula melalui infrastruktur yang tersedia dari partisipasi masyarakat. Desa merupakan daerah yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Sejalan dengan kehadiran era modern, kemampuan masyarakat desa dalam hal partisipasi mulai berkurang. Seperti penjelasan sebelumnya dan sebagai letak kantor kecamatan yang notabene merupakan pusat administratif Kecamatan Wagir, seharusnya Desa Parang argo memiliki infrastruktur yang baik agar kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan kesejahteraan masyarakatnya dapat tercapai. Dari tahun ke tahun, perubahan infrastruktur di Kecamatan Wagir tidak begitu terlihat perkembangannya, bahkan

beberapa infrastruktur terlihat semakin buruk kondisinya. Atas dasar pemikiran tersebut, maka peneliti tertarik meneliti “Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Program Pembangunan Infrastruktur Tahun 2013 (Studi Desa Parangargo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang).”

METODE

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang didapatkan dari pengamatan perilaku, persepsi, dan pemikiran individu maupun kelompok melalui hasil observasi, wawancara. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta dan data yang tampak sebagaimana adanya.

Peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data dengan menggunakan instrumen penelitian lain berupa pedoman wawancara. Jenis dan sumber data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi dan wawancara. Langkah-langkah analisis data yang digunakan yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Pada penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid

apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Untuk menguji kevalidan data diperlukan langkah-langkah yang dilakukan yaitu uji kredibilitas, pengujian *transferability*, dan pengujian *dependability*. Uji kredibilitas terdiri dari perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck. Nilai transfer berkenaan dengan pertanyaan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian, maka peneliti dalam membuat laporan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca dapat memutuskan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Tahapan penelitian yang digunakan sesuai dengan teori moleong yaitu tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan, dan tahap analisis data.

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Parangargo

RPJM-Desa Parangargo tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 memuat rencana-rencana pembangunan infrastruktur Desa Parangargo tahun 2010-2014 yang merupakan bukti nyata pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Rencana-rencana tersebut

tidak akan terwujud tanpa partisipasi dari seluruh komponen termasuk masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa Parangargo. Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Parangargo merupakan penggerak sekaligus penentu keberhasilan pembangunan infrastruktur di desa itu sendiri. Masyarakat Desa Parangargo merupakan masyarakat yang memiliki semangat gotong royong yang tinggi. Semangat tersebut merupakan modal dasar masyarakat dalam berpartisipasi dalam program pembangunan infrastruktur di Desa Parangargo.

Partisipasi merupakan keterlibatan seseorang dalam bentuk apapun pada sebuah program atau kegiatan. Partisipasi masyarakat Desa Parangargo terbagi menjadi tiga bentuk yaitu ide atau pemikiran, tenaga, dan konsumsi. Partisipasi pemikiran adalah keterlibatan atau keikutsertaan seseorang yang menyampaikan ide, pendapat atau argumen pada suatu kesempatan diskusi didalam forum maupun diluar forum. Partisipasi tenaga adalah keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan pembangunan dengan memberikan tenaganya untuk ikut serta mengerjakan pembangunan, memelihara, maupun memperbaiki infrastruktur. Partisipasi konsumsi adalah keterlibatan seseorang dalam bentuk memberikan konsumsi berupa makanan dan atau minuman kepada para pekerja pada saat pembangunan infrastruktur berlangsung.

Partisipasi dalam bentuk pemikiran merupakan bentuk partisipasi dengan jumlah partisipan yang paling rendah. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Umi Listyaningsih dengan studi kasus Kecamatan Nanggulan Kabupaten

Kulonprogo Yogyakarta menemukan kondisi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam menentukan arahan pembangunan fisik yang akan dijalankan pada desa tersebut masih rendah. Kondisi yang sama terjadi di Desa Parangargo, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Parangargo sangat kurang terlibat dalam menentukan arahan pembangunan infrastruktur di Desa Parangargo. Bentuk partisipasi berupa ide atau pemikiran masih didominasi oleh petinggi desa mulai dari tingkat RT, RW, Dusun, hingga pejabat kantor Desa. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kurangnya informasi yang diterima masyarakat tentang adanya forum diskusi tingkat desa.

Partisipasi dalam bentuk tenaga diberikan oleh bapak-bapak Desa Parangargo. Pada penelitian terdahulu, Umi Listyaningsih membandingkan bentuk partisipasi desa kaya dengan desa miskin. Bentuk partisipasi dari desa miskin didominasi pada bentuk partisipasi berupa tenaga. Sedangkan pada desa kaya didominasi pada bentuk partisipasi berupa tenaga dan uang atau berupa barang material. Sebagai pusat administrasi Kecamatan, seharusnya Desa Parangargo merupakan desa kaya yang memiliki dominasi bentuk partisipasi berupa tenaga dan uang atau barang material. Namun kondisi ideal tersebut tidak nampak di Desa Parangargo. Tidak terdapat partisipasi dalam bentuk uang maupun barang material dari masyarakat Desa Parangargo dikarenakan isu yang beredar di masyarakat tentang pendanaan

pembangunan ditanggung penuh oleh pemerintah.

Ibu-ibu Desa Parangargo berpartisipasi dalam bentuk menyediakan konsumsi berupa makanan dan minuman bagi bapak-bapak yang sedang mengerjakan pembangunan infrastruktur. Bentuk partisipasi tersebut didominasi oleh kaum ibu karena tenaga terbatas yang dimiliki ibu-ibu. Pembangunan infrastruktur membutuhkan orang-orang yang kuat dan bertenaga besar untuk membantu pengerjaan pembangunan. Secara bergantian, ibu-ibu Desa Parangargo dengan cekatan menyediakan konsumsi bagi pekerja. Dana yang digunakan untuk menyediakan konsumsi tersebut merupakan dana pribadi atau dana keluarga yang diberikan secara sukarela.

Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa Parangargo. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Parangargo tidak berpartisipasi dalam program pembangunan infrastruktur. Seharusnya LPMD sebagai sebuah lembaga mampu menjadi mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakatnya. PKK sebagai salah satu LKD mulai menunjukkan eksistensinya sebagai mitra pemerintah yang mulai belajar untuk memberdayakan kaum ibu di Desa Parangargo. Karang taruna sebagai salah satu LKD walaupun tidak nampak menjalankan peran dan fungsinya tetapi pemerintah desa mulai merintis dan memberi kepercayaan kepada karang taruna sebagai sarana untuk memberdayakan kalangan muda di Desa Parangargo.

Secara umum partisipasi masyarakat Desa Parangargo tergolong cukup baik dilihat dari

jumlah partisipan dan jumlah bentuk partisipasi yang diberikan. Berdasarkan teori turindra, maka masyarakat Desa Parangargo tergolong kedalam tahapan partisipasi point pelaksanaan kegiatan dan point pemanfaatan kegiatan. Secara umum partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa Parangargo masih membutuhkan pembelajaran dalam memberdayakan masyarakatnya karena LKD desa Parangargo tergolong baru. Badrun Susantyo dalam jurnalnya yang merupakan hasil penelaahan dari tulisan David C. Korten menyebutkan empat kegiatan dalam partisipasi yaitu membuat keputusan, pelaksanaan, memperoleh hasil, dan penilaian terhadap seluruh kegiatan. Baik masyarakat maupun LKD di Desa Parangargo saat ini masih melakukan dua kegiatan yaitu pelaksanaan dan memperoleh hasil. Padahal seharusnya unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam partisipasi adalah inisiatif dan proses pengambilan keputusan yang dipusatkan dari masyarakat.

Pembangunan infrastruktur di Desa Parangargo memberikan dampak perubahan yang lebih baik. Perubahan ini meliputi peresapan air yang lebih baik akibat perbaikan drainase dan kenyamanan berlalu lintas yang baik di beberapa titik akibat dari pavingisasi dan pembangunan rabat jalan. Kenyamanan dalam pertemuan forum di gedung balai pertemuan atau pendopo desa. Serta jalan yang nampak baik dari hasil penyemiran jalan. Partisipasi masyarakat yang didukung dengan kerjasama pemerintah membuahkan hasil pembangunan yang baik pula. Kondisi tersebut akan jauh lebih baik jika LKD Desa Parangargo sudah

mampu menjalankan fungsi dan perannya dengan mandiri.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

1. Kondisi Masyarakat Desa parangargo

Masyarakat Desa parangargo merupakan masyarakat yang modern dan majemuk namun tetap memegang adat dan peraturan desa yang berlaku. Pengaruh modern di Desa parangargo nampak dari munculnya pabrik-pabrik yang berakibat negatif pada kondisi infrastruktur Desa Parangargo. Walaupun dunia modern sudah menyentuh Desa parangargo dan banyak penduduk pendatang, namun melalui kehidupan bersama, masyarakat asli Desa Parangargo mampu menularkan adat dan ketentuan desa yang berlaku seperti tradisi gotong royong.

Pada akhirnya semangat gotong royong yang dimiliki masyarakat Desa Parangargo inilah yang menjadi tumpuan dasar masyarakat dalam berpartisipasi. Sesuai dengan pengertian dari masyarakat itu sendiri, kebutuhan atau kebergantungan satu orang dengan orang yang lain membawa masyarakat kepada semangat gotong royong. Sayangnya semangat gotong royong ini tidak disertai dengan pemahaman masyarakat tentang arti penting peran masyarakat dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur. Pemahaman masyarakat tersebut sangat penting untuk diketahui karena semakin sadar masyarakat akan perannya, akan semakin baik partisipasi yang diberikan dan akan semakin baik pula hasil pembangunan infrastruktur yang dikerjakan sehingga kesejahteraan masyarakat sebagai *ending* yang

diharapkan akan tercapai dengan maksimal.

2. Kondisi Lembaga

Kemasyarakatan Desa (LKD)

Lembaga Kemasyarakatan Desa Parangargo terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), PKK, dan Karang Taruna. Berdasarkan pengertian LKD yang sudah dibahas sebelumnya, LKD Desa Parangargo seharusnya menjadi ujung tombak pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Parangargo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPMD tidak berjalan aktif dalam artian tidak mengerjakan fungsi dan perannya dengan baik. Struktural LPMD sudah tertulis di RPJM-Des 2010-2014 namun hal tersebut tidak dapat menjamin keaktifan LPMD. Sehingga jelas bahwa delapan tugas utama LPMD tidak ada yang dikerjakan sama sekali. Alasan LPMD tidak aktif belum dapat digali lebih dalam oleh Bapak kepala Desa. Namun Bapak Kepala Desa berniat untuk segera mengaktifkan kembali LPMD dengan memperbaiki struktural LPMD.

PKK Desa Parangargo termasuk kedalam kategori baru karena walaupun PKK sudah lama dibentuk namun sudah lama pula PKK tersebut tidak aktif. Sejak Bergantinya Kepala Desa yang baru, PKK Desa Parangargo diperbaharui dan diaktifkan kembali dengan mengisi PKK dengan orang-orang baru. Hal tersebut mengingat banyaknya pendatang di Desa Parangargo serta merangkul kembali anggota lama yang tidak pernah hadir di PKK. Terbentuknya kembali PKK tersebut membawa keuntungan bagi pemerintah Desa. Melalui PKK pemerintah desa mendapatkan kepercayaan dari kaum ibu.

Kepercayaan ini merupakan modal dasar pemerintah baik dalam memberikan sosialisasi tentang program pembangunan maupun memberikan pemahaman atau pemikiran baru terkait dengan program pembangunan infrastruktur. Kondisi menariknya adalah hanya keluarga ibu-ibu “pemangku jabatan” seperti ibu RT yang memahami betul peran partisipasi mereka dalam pembangunan infrastruktur di wilayahnya, sayangnya pemahaman tersebut tidak disertai dengan tindakan inisiatif untuk memberikan partisipasi yang maksimal. Hal tersebut dirasa wajar mengingat PKK di Desa Parangargo masih tergolong baru.

Berbeda dengan LPMD maupun PKK, Karang Taruna Desa Parangargo menunjukkan kondisi yang ‘suam-suam kuku’. Jika LPMD tidak aktif, PKK mulai aktif dan bangkit, karang taruna justru berada di tengah-tengah kondisi keduanya. Pemerintah Desa menghidupkan kembali karang taruna dengan mengisi anggota-anggota baru. Jika di PKK usaha tersebut berhasil, namun di karang taruna nampaknya tidak berhasil. Pemerintah Desa mengaku kesulitan dalam mengajak kaum muda dan mudi Desa Parangargo. Padahal keberadaan karang taruna sangatlah penting sebagai salah satu LKD yang berfungsi meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya pemuda dan pemudi. Pemerintah Desa berusaha mendapat simpati dan kepercayaan dari pemuda desa dengan memberi mereka *bedak* untuk diusahak secara gratis. Namun usaha tersebut tidak berhasil dengan ‘menganggurnya’ *bedak* tersebut. Nampaknya pemuda Desa Parangargo masih tetap bertahan pada sikap tidak peduli

terhadap program desa termasuk program pembangunan infrastruktur Desa Parangargo. Sampai saat ini, pemerintah desa belum menetapkan rencana lebih lanjut untuk merangkul pemuda Desa Parangargo. Jika melihat kondisi LKD tersebut, maka pernyataan sumodiningrat tentang penguatan lembaga non pemerintah yang terlibat partisipasi belum terlihat karena masih dalam tahap perintisan kembali.

3. Kemampuan Pemerintah Desa Parangargo Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Pada tahun 2013 Desa Parangargo telah menyelesaikan 5 program yaitu:

- a. Drainase
- b. Rabat Jalan
- c. Gedung Balai Pertemuan atau Pendopo Desa
- d. Pavingisasi
- e. Penyemiran

Drainase dan pavingisasi merupakan dua program yang tertunda pelaksanaannya. Salah satu penyebab tertundanya pelaksanaan pembangunan tersebut karena kemampuan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakatnya.

Masyarakat Desa Parangargo Parangargo masih memiliki anggapan bahwa penentu arah kebijakan pembangunan di desa ditentukan oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat. Pemikiran tersebut berdampak pada keengganan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk ide, usulan, maupun tanggapan atas pembangunan infrastruktur di desanya. Pada sisi lain, muncul isu yang beredar di masyarakat bahwa dana pembangunan infrastruktur disediakan penuh oleh pemerintah pusat.

Isu tersebut berdampak pada sikap diam dalam ide maupun dana. Dalam hal ini maksudnya adalah masyarakat sedikit sekali masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk ide dan memilih untuk tidak mengadakan iuran sukarela untuk pembangunan infrastruktur. Dengan kondisi tersebut pemerintah Desa Parangargo harus mampu mengubah pemikiran tersebut dahulu untuk meningkatkan partisipasi masyarakatnya. Tugas tersebut seharusnya dikerjakan oleh LKD Desa Parangargo, namun karena LKD desa parangargo seperti yang dijelaskan sebelumnya maka tugas ini dikerjakan oleh Pemerintah Desa. Substitusi tugas ini tidak efektif bagi keberlangsungan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Parangargo, karena pemerintah Desa juga menjalankan tiga fungsi lainnya sekaligus yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas program pembangunan.

Secara umum kemampuan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakatnya mulai nampak bagus ketika jabatan Kepala Desa Parangargo dipegang oleh Bapak Hari Purnomo. Jabatan baru yang dipegang Bapak Hari Purnomo membawa semangat baru bagi kepala Desa untuk menjalankan tugasnya.

C. Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Modal dasar dari sebuah pembangunan infrastruktur adalah masyarakat yang mau berpartisipasi mendukung pelaksanaan program pembangunan tersebut. Desa Parangargo memiliki modal dasar yang cukup tersebut karena semangat

gotong royong yang sudah ada di dalam masyarakat Desa Parangargo. Namun partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tetapi juga mulai tahap perencanaan bahkan pengambilan keputusan. Untuk mendapatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan, maka pemerintah Desa Parangargo sudah melakukan berbagai upaya sepanjang tahun 2013.

1. Forum Tingkat Desa

Menurut Asri Lubis dalam jurnalnya yang berjudul upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan mengatakan bahwa “demokrasi yang sehat tergantung pada bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang baik dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah”. Sayangnya informasi yang beredar di masyarakat tidak sesuai dengan informasi sebenarnya. Pemerintah Desa berusaha memberikan informasi yang sebenarnya agar demokrasi yang sehat dapat terbentuk dan akan bermuara pada meningkatnya partisipasi masyarakat.

Forum diskusi tingkat desa merupakan forum yang sengaja dibentuk oleh pemerintah desa sebagai wadah komunikasi timbal balik antara pemerintah desa dengan masyarakat mengenai program pembangunan infrastruktur desa. Forum diskusi ini dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua RT, Ketua RW, lima perwakilan masyarakat masing-masing RT, Karang taruna dan BPD. Dalam suatu sistem publik kepentingan yang ada sangatlah beragam, karena beragam pula pemangku kepentingan yang ada didalamnya. Menyadari hal tersebut asri lubis lebih lanjut menyatakan

bahwa tidak hanya sudut pandang pemerintah saja yang dianggap cukup untuk menerjemahkan proses pembangunan suatu negara tetapi sudut pandang masyarakat juga dibutuhkan karena masyarakat juga berada didalamnya. Hal tersebut berlaku sama di Desa Parangargo sehingga pemerintah desa parangargo mempertemukan sudut pandang dari semua pihak didalam sebuah forum diskusi tingkat desa.

Dalam forum diskusi tersebut pemerintah desa dapat menyampaikan berupa sosialisasi program, transparansi besarnya dana program, sistem penggunaan penerapan dan pertanggung jawaban program. Sedangkan masyarakat dapat menyampaikan ide kebutuhan di lingkungannya atau pendapat mengenai program pembangunan yang disampaikan pemerintah desa. Komunikasi dari keduanya dibutuhkan agar terjadi kesatuan pendapat antara aparat desa dan warga masyarakat serta tersalurkan nya aspirasi masyarakat tentang kekurangan yang ada di lingkungannya.

Masih dalam jurnal yang sama, Asri Lubis mengatakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi sangat penting karena masyarakat perlu mengetahui nalar di belakang setiap keputusan yang diambil oleh para wakilnya atau pemimpinya walaupun pemimpin atau wakilnya itu mendapat kewenangan untuk mengambil keputusan tersebut. Keterlibatan masyarakat Desa parangargo perlu tahu nalar di belakang setiap keputusan para pemimpin dalam Program pembangunan infrastruktur di Desa parangargo. Hal tersebut dapat memberikan kepuasan kepada publik

sehingga pemerintah mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari publik.

2. Mengaktifkan Kembali PKK

PKK merupakan salah satu LKD yang dimiliki Desa Parangargo. Keberadaan PKK sangatlah membantu pemerintah Desa parangargo dalam mensosialisasikan program pembangunan infrastruktur kepada kaum ibu di Desa Parangargo. PKK Desa Parangargo sudah berdiri sejak lama namun baru kembali aktif sejak akhir tahun 2013 setelah Kepala Desa Parangargo berganti.

Melalui PKK ini, pemerintah Desa Parangargo berusaha melakukan pendekatan kepada kaum ibu untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur seperti halnya yang disampaikan pemerintah desa didalam forum tingkat desa. Perbedaannya program pembangunan yang dibahas lebih mendalam adalah program pembangunan yang dekat dengan kehidupan ibu-ibu seperti program posyandu yang menjadi rebutan enam RW di Desa Parangargo. Untuk program yang lainnya diberitahukan dengan tujuan agar ibu-ibu dapat berpartisipasi dalam bentuk konsumsi.

3. Mengaktifkan Kembali Karang Taruna

Karang Taruna adalah salah satu LKD yang diharapkan pemerintah Desa Parangargo mampu meningkatkan partisipasi masyarakat terutama kalangan muda. Karang taruna yang sudah lama tidak aktif kini diaktifkan kembali. Walaupun pendekatan pemerintah desa kepada pemuda dinilai gagal, namun pemerintah tidak menyerah begitu saja. Pemerintah Desa Parangargo

memilih sikap berani mengambil resiko besar dengan langsung memberikan tanggung jawab sebuah program kepada karang taruna. Program yang dimaksud adalah program pengolahan sampah. Keberhasilan program pengolahan sampah tersebut menjadi taruhannya apabila karang taruna benar-benar tidak dapat diajak kerjasama dengan pemerintah desa. Namun pemerintah tidak menyerahkan secara penuh program tersebut. Pengawasan secara ketat dilakukan oleh pemerintah desa pada pelaksanaan program tersebut. Program pengolahan sampah dipilih karena dipandang sebagai program yang tepat dengan kapasitas dan kualitas pemuda Desa Parangargo.

Secara umum upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa tersebut dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan tersebut dinilai dari jumlah partisipan yang terlibat. Setengah dari jumlah undangan untuk turut serta dalam forum diskusi tingkat desa hadir. Selain itu, program yang dilimpahkan kepada masyarakat untuk dikerjakan juga berjalan.

KESIMPULAN

1. Secara umum partisipasi masyarakat Desa Parangargo tergolong cukup baik dilihat dari jumlah partisipan dan jumlah bentuk partisipasi yang diberikan. Hal tersebut terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan dari tiga bentuk partisipasi yang ditemukan dalam penelitian ini, tujuh orang informan menyatakan berpartisipasi dalam satu atau dua bentuk partisipasi dan satu orang informan menyatakan tidak ikut berpartisipasi. Sedangkan partisipasi

Lembaga Kemasyarakatan Desa Parangargo tergolong masih kurang dan masih membutuhkan pembelajaran dalam memberdayakan masyarakatnya karena LKD desa Parangargo tergolong baru. Hal tersebut terbukti dari kurangnya partisipasi dari LPMD dan Karang Taruna sebagai bagian dari LKD Desa Parangargo. Pada dasarnya partisipasi masyarakat tidak bisa muncul dengan sendirinya, masih diperlukan peran serta pemerintah untuk memunculkan partisipasi masyarakat.

2. Ada tiga faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa parangargo yaitu kondisi masyarakat, kondisi LKD, dan kemampuan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
3. Ada tiga peranan pemerintah Desa Parangargo untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Parangargo, yaitu mengadakan forum diskusi tingkat desa, mengaktifkan kembali PKK, dan mengaktifkan kembali karang taruna. Secara umum upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa tersebut dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan tersebut dinilai dari jumlah partisipan yang terlibat dan keberhasilan pelaksanaan program. Pada tahun 2013 Desa Parangargo telah menyelesaikan 5 program yaitu drainase, rabat Jalan, gedung balai pertemuan atau pendopo desa, pavingisasi, dan penyemiran jalan aspal.

REKOMENDASI

1. Pemerintah dapat mengadakan lomba “ide cemerlang untuk Parangargo lebih gemilang”. Lomba ini dimaksudkan untuk merangsang masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam bentuk ide. Teknis pelaksanaan lomba dapat dikordinasi oleh pemerintah Desa dengan memberikan hadiah menarik bagi masyarakatnya yang berani mem-berikan ide terbaik untuk kemajuan pembangunan infrastruktur di Desa Parangargo. Kategori ide terbaik dapat dilihat dari *multiplier* effect yang ditimbulkan, besarnya dana yang digunakan (semakin kecil dana yang diminta dari pemerintah desa maka semakin baik), dan keramahannya dengan lingkungan.
2. Pemerintah menetapkan besarnya iuran dari masyarakat yang diperuntukkan untuk pem-bangunan infrastruktur di Desa parangargo, hal ini dapat mening-kan partisipasi masyarakat terutama dalam bentuk pem-biayaan infrastruktur.
3. Mengaktifkan kembali Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Parangargo sebagai mitra pemerintah Desa Parangargo dalam pemberdayaan masya-rakatnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Gunawan, Sumodiningrat. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Dari UGM Library, (Online), (<http://lib.ugm.ac.id>), diakses 23 April 2013.
- Nurkatamso, Agus & Umi Listyaningsih. 2013. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Fisik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta. *Jurnal Bumi Indonesia*, (online), 2 (2): 63-67, (<http://lib.geo.ugm.ac.id>), diakses 19 April 2013.
- Pratikno. 2005. Otonomi Daerah: Pengelolaan Antara Pusat dan Daerah. Syamsuddin Haris (Ed.), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (halm. 26). Jakarta: LIPI Press.
- Rasyid, M. Ryaas. 2005. Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depannya. Syamsuddin Haris (Ed.), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (halm. 10). Jakarta: LIPI Press.
- Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa